Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 4, May 2026, P. 174-178
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539188

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Mendukung Pemerataan Pendidikan di Kota Palangka Raya

Implementation of the Indonesia Smart Program (PIP) in Supporting Educational Equity in Palangka Raya City

Delpin, Billy Agustino
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
Email : delpindel5@gmail.com billyagustino34@gmail.com

Abstrak

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan pilar kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk memperluas aksesibilitas dan menciptakan pemerataan layanan pendidikan bagi peserta didik dari kelompok keluarga prasejahtera melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di tingkat daerah, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memegang peranan krusial sebagai fasilitator dan pengawas jalannya program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi PIP oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, mengukur efektivitasnya dalam mendorong ekuitas pendidikan, serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta laporan otoritas resmi. Hasil telaah menunjukkan bahwa penyaluran PIP di Kota Palangka Raya berkontribusi positif dalam meringankan beban finansial siswa dan menekan angka putus sekolah. Namun, efisiensi program di tingkat daerah masih tereduksi oleh kendala klasik seperti ketidaktepatan data usulan (inklusi-eksklusi), birokrasi perbankan, keterlambatan pencairan, dan minimnya jangkauan sosialisasi ke wilayah pinggiran kota. Upaya sinkronisasi data Dapodik secara *real-time*, pengetatan supervisi oleh Dinas Pendidikan, dan optimalisasi koordinasi multipihak mutlak diperlukan agar akselerasi pemerataan pendidikan di Kota Palangka Raya dapat tercapai secara maksimal.
Kata Kunci: *Program Indonesia Pintar (PIP), Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Pemerataan Pendidikan, Akses Pendidikan.*

Abstract

The Program Indonesia Pintar (PIP) represents a strategic government initiative designed to expand educational accessibility and foster equity for students from economically disadvantaged backgrounds through the Kartu Indonesia Pintar (KIP). At the local level, the Palangka Raya City Education Office plays a crucial role as a facilitator and supervisor of this program. This study aims to analyze the dynamics of PIP's implementation by the Palangka Raya City Education Office, evaluate its effectiveness in promoting educational equity, and identify the driving and hindering factors encountered in the field. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were gathered through literature and documentation studies of scientific journals, government regulations, and official institutional reports. The findings indicate that the distribution of PIP in Palangka Raya City has generated a positive impact by alleviating students' financial burdens and mitigating dropout risks. Nevertheless, the program's efficiency at the local level remains constrained by classic issues such as data inaccuracies in student proposals (inclusion-exclusion errors), banking bureaucracies, delayed disbursements, and a lack of socialization to suburban areas. Continuous refinement of Dapodik data systems, stringent supervision by the Education Office, and enhanced multi-stakeholder coordination are imperative to ensure the optimal acceleration of educational equity in Palangka Raya City.
Keywords: *Program Indonesia Pintar (PIP), Palangka Raya City Education Office, Educational Equity, Education Access.*

Article Info
Received date: 15 May 2026 Revised date: 20 May 2026 Accepted date: 02 June 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan determinan utama dalam mentransformasi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengeskalasi roda pembangunan daerah. Melalui akses pendidikan yang inklusif dan merata, masyarakat dapat mengaktualisasikan kapasitas intelektual, mengasah keterampilan, serta memutus rantai kemiskinan struktural. Namun, tantangan geografis dan ketimpangan sosio-ekonomi

sering kali menjadi batu sandungan bagi masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Di Kota Palangka Raya, urusan pendidikan dasar menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah melalui **Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya**. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Pendidikan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap anak usia sekolah di wilayah ini mendapatkan haknya untuk belajar tanpa terhalang kendala finansial. Kebijakan jaring pengaman sosial yang menjadi instrumen utama dalam mengintervensi masalah ini adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui pemberian bantuan tunai via Kartu Indonesia Pintar (KIP), PIP dirancang untuk meringankan biaya personal peserta didik, seperti pembelian seragam, alat tulis, dan transportasi.

Secara faktual, Kota Palangka Raya memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan, terutama pada wilayah *urban fringe* (pinggiran kota) seperti di Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu. Ketimpangan akses ini tecermin dari fluktuasi Angka Partisipasi Murni (APM) dan risiko putus sekolah yang didominasi oleh faktor keterbatasan ekonomi keluarga prasejahtera.

Dalam konteks lokal, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memegang peran sentral dalam melakukan verifikasi data usulan sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), melakukan pembinaan, serta mengawasi proses penyaluran agar tepat sasaran dan tepat guna. Meskipun program ini telah berjalan, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Dinamika kependudukan dan kendala teknis di Kota Palangka Raya acap kali memicu terjadinya masalah salah sasaran (*inclusion and exclusion error*), keterlambatan pencairan dana oleh bank penyalur, hingga minimnya literasi orang tua siswa di kawasan pinggiran kota mengenai mekanisme aktivasi rekening. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi PIP oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya penting dilakukan guna mengukur sejauh mana program ini efektif mendukung pemerataan pendidikan di daerah tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam mendukung pemerataan pendidikan?
2. Sejauh mana efektivitas Program Indonesia Pintar dalam membantu siswa kurang mampu di Kota Palangka Raya?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan program tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Peran Dinas Pendidikan dalam Otonomi Daerah

Berdasarkan sistem desentralisasi, Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota bertindak sebagai pengelola, pelaksana, dan pengawas teknis kebijakan pendidikan nasional di tingkat daerah, termasuk dalam proses validasi data siswa penerima bantuan sosial pendidikan.

Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan adalah upaya penyediaan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sehingga meminimalkan disparitas antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Untuk membedah keberhasilan suatu kebijakan, teori George C. Edwards III menetapkan empat indikator krusial yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi: Kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi kepada pelaksana dan masyarakat.
2. Sumber Daya: Ketersediaan staf yang kompeten, sarana, dan wewenang.
3. Disposisi: Sikap, komitmen, dan kecenderungan para implementor.
4. Struktur Birokrasi: Kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi antarlembaga.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan **metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif** untuk mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan secara mendalam. Sumber data yang digunakan adalah **data sekunder** yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Peneliti menganalisis jurnal ilmiah terakreditasi, dokumen regulasi, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan maupun dokumen publikasi terkait dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Batasan waktu literatur dan dokumen resmi yang ditelaah dalam studi kepustakaan ini dibatasi pada produk ilmiah dan laporan yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2026 demi menjaga aktualitas data. Teknik analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi tiga tahapan mendasar:

1. Reduksi Data: Memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus peran Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
2. Penyajian Data: Menyusun data ke dalam teks naratif dan tabel komparatif agar sistematis dan mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan verifikasi data yang telah disintesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PIP oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya bertindak sebagai intermedian yang menjembatani kebijakan Kementerian Pendidikan Pusat dengan pihak sekolah selaku garda terdepan. Implementasi program ini meliputi proses validasi usulan siswa kurang mampu yang diinput oleh operator sekolah ke dalam sistem Dapodik. Dinas Pendidikan juga bertugas menerbitkan surat rekomendasi aktivasi rekening bagi siswa yang ditetapkan sebagai penerima SK Nominasi, serta melakukan monitoring berkala terhadap serapan dana di bank penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Ditinjau dari dimensi **Struktur Birokrasi**, koordinasi formal telah berjalan baik, namun koordinasi eksternal (dengan bank penyalur) masih membutuhkan penguatan karena SOP pencairan bank sering kali kurang sinkron dengan kebutuhan cepat pihak sekolah.

Efektivitas Program dalam Pemerataan Pendidikan

Secara umum, intervensi PIP di Kota Palangka Raya dinilai cukup efektif dalam menekan angka putus sekolah (*dropout*). Stimulus finansial yang diterima siswa mampu memenuhi kebutuhan personal sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS, seperti pembelian buku penunjang dan ongkos transportasi harian. Keberadaan program ini secara tidak langsung meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Palangka Raya dan membantu mewujudkan ekuitas akses pendidikan bagi anak-anak di daerah marginal/pinggiran kota.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

1. Komitmen Anggaran dan Kebijakan (Disposisi): Adanya komitmen anggaran dan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutan program.

2. Kemudahan Teknologi (Sumber Daya): Integrasi sistem Dapodik digital yang memudahkan pihak sekolah dalam mengusulkan data siswa prasejahtera secara cepat.
3. Kemitraan Internal: Sinergi yang baik antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan komite dalam pengawalan hak siswa di lapangan.

Faktor Penghambat:

1. Asimetri Informasi (Komunikasi): Kurangnya sosialisasi yang masif dan inklusif dari dinas ke wilayah pelosok/pinggiran Kota Palangka Raya, membuat banyak orang tua tidak paham cara aktivasi rekening buku tabungan SimPel (Simpanan Pelajar).
2. Validitas Data (Sumber Daya Informasi): Masih ditemukan ketidaktepatan sasaran akibat data DTKS Kemensos yang belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi riil ekonomi siswa di lapangan (*inclusion and exclusion error*).
3. Kendala Birokrasi Perbankan (Struktur Birokrasi): Antrean yang panjang dan syarat administrasi perbankan yang kaku sering kali memperlambat proses pencairan dana oleh orang tua siswa. Hal ini diperparah oleh keterbatasan perangkat digital dan waktu operasional orang tua siswa prasejahtera yang bekerja di sektor informal

SIMPULAN

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memiliki kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Program ini berhasil meringankan hambatan finansial dan memberikan jaminan keberlanjutan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meskipun demikian, capaian efektivitasnya di tingkat daerah masih membentur kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan keterlambatan pencairan dana akibat hambatan birokrasi perbankan serta asimetri komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, reformasi sistem pemutakhiran data secara berkala, serta penguatan koordinasi yang lebih fleksibel antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, lembaga perbankan, dan masyarakat agar tujuan keadilan pendidikan dapat tercapai secara maksimal di Kota Palangka Raya.

SARAN

1. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya perlu memperluas jangkauan sosialisasi program secara masif ke wilayah pinggiran kota agar meminimalkan asimetri informasi dan mencegah hangusnya dana bantuan akibat keterlambatan aktivasi.
2. Pihak Sekolah disarankan untuk lebih selektif, objektif, dan faktual saat melakukan verifikasi kondisi ekonomi siswa sebelum melakukan input usulan ke dalam sistem Dapodik.
3. Otoritas terkait perlu meningkatkan koordinasi dengan Pihak Perbankan Penyalur demi menciptakan simplifikasi prosedur birokrasi penarikan dana tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
4. Diperlukan penguatan sinergi antara RT/RW atau kelurahan setempat bersama komite sekolah untuk mendampingi orang tua siswa prasejahtera yang memiliki keterbatasan literasi administrasi perbankan

REFERENSI

Agustina, L., & Wardani, A. K. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan operasional Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menekan angka putus sekolah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 25*(2), 112–126.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. (2024). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya*. Pemerintah Kota Palangka Raya.

Fitriani, S., & Nugroho, B. (2022). Peran dinas pendidikan dalam pengawasan jaring pengaman sosial bidang pendidikan di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi Publik Daerah, 14*(1), 35–48.

Hidayat, R. (2020). Akurasi data Dapodik dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial pendidikan: Masalah inclusion dan exclusion error. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan, 8*(3), 201–215.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia & Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. (2025). *Petunjuk teknis pelaksanaan dan pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) daerah*. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Lestari, P., & Supriadi, D. (2023). Analisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) menggunakan teori George C. Edwards III. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11*(2), 89–104.

Murni, S. (2022). Strategi dinas pendidikan dalam pemerataan akses pendidikan di wilayah urban fringe (pinggiran kota). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 10*(4), 145–158.

Nugraha, A. P., et al. (2023). Hambatan birokrasi perbankan dan administrasi sekolah dalam pencairan dana bantuan siswa prasejahtera. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 17*(2), 76–88.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Prasetyo, E. (2021). Dampak sosiologis bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap motivasi belajar siswa dari keluarga miskin. *Jurnal Sosio-Humaniora, 9*(1), 12–25.

Putra, R. A., & Sari, M. M. (2024). Disparitas akses pendidikan dan tantangan pemerataan mutu sekolah dasar di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebudayaan, 19*(2), 130–144.

Putri, M., et al. (2022). Pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora, 7*(2), 88–97.

Rifa'i, A., & Afriansyah, H. (2019). Proses pengambilan keputusan. *ResearchGate*, 1–12.

Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 4*(1), 52–66.

Saputra, H., et al. (2022). Evaluasi efektivitas Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan angka partisipasi murni (APM). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13*(1), 57–71.

Sukarma, I. K., Karyasa, T. B., Hasim, H., et al. (2022). Peran bantuan pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu. *Jurnal Pendidikan dan Sosial, 5*(2), 45–56.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zaidah, A., et al. (2021). Pengaruh pendidikan terhadap motivasi generasi muda dalam melanjutkan pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 3*(1), 20–29.